

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2018). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2018). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bessel A. van der Kolk. (1988). *Psychological Trauma*. Washington DC: American Psychiatric Publishing.
- Donald Dutton. (2011). *Rethinking Domestic Violence*. Kanada: UBC Press.
- Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Elizabeth M. Schneider. (2000). *Battered Women and Feminist Lawmaking*. New Haven: Yale University Press.
- Evan Stark. (2007). *Coercive Control*. New York: Oxford University Press.
- Gustav Radbruch. (2006). *Rechtsphilosophie* (terj. Stanley L. Paulson). Oxford: Oxford Journal of Legal Studies.
- Hari Sasangka & Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hendri Jayadi, dkk. (2024). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Indriyanto Seno Adji. (2018). *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jan Remmelink. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Joshua Dressler. (2018). *Understanding Criminal Law* (8th ed.). Durham: Carolina Academic Press.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Lenore E. A. Walker. (1979). *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer Publishing Company.
- Lenore E. A. Walker. (2009). *The Battered Woman*. Britania Raya: HarperCollins.
- Lenore E. A. Walker. (2016). *The Battered Woman Syndrome* (4th ed.). New York: Springer Publishing Company.
- Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. (2017). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- R. Soesilo. (1991). *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Wirjono Prodjodikoro. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- Bundesrepublik Deutschland. *Strafgesetzbuch (StGB)* §§ 21, 32, 33, 49.
- Bundesrepublik Deutschland. *Gewaltschutzgesetz* (2001).

C. JURNAL ILMIAH

- Adrienne Kemp et al. (1991). PTSD in battered women. *Journal of Traumatic Stress*, 4(1).
- Bramastha & Maharani. (2023). Noodweer Excess. *Kertha Desa*, 11(6).

- Caitlin Nash & Rachel Dioso-Villa. (2024). Australia's legal responses. *Violence Against Women*, 30(6–7).
- Elizabeth Sheehy et al. (2012). *Sydney Law Review*, 34.
- Johannes Kaspar. (2013). Rechtsbewährung. *Rechtswissenschaft*, 4(1).
- Lenore E. Walker. (2006). Battered woman syndrome. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1087.
- Rebecca Campbell et al. (2001). Secondary victimization. *Journal of Interpersonal Violence*, 16(12).
- Ted Robert Gurr. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton University Press.

D. PUTUSAN PENGADILAN

- Bundesgerichtshof (BGH). BGHSt 32, 38 (1983) – *Haustyrannenfall*.
- Bundesgerichtshof. Putusan 25 Oktober 1984 – 4 StR 492/84.
- Bundesgerichtshof. Putusan 21 Juni 1994 – 1 StR 207/94.

E. INTERNET / ARTIKEL ONLINE

- CNN Indonesia. (2025). *Komnas Perempuan: Kekerasan Perempuan Meningkat 10 Persen di 2024*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- GoodStats Data. (2024). *Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia*. Diakses dari <https://data.goodstats.id>
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Pengaruh Korban KDRT terhadap Kejiwaan*. Diakses dari <https://keslan.kemkes.go.id>
- Hukumonline. (2024). *Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Mahkamah Agung RI. (2024). *Konstelasi Alasan Penghapus Pidana*. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id>